

## FORMATION HISTORY ANAMBAS ISLAND OF RIAU ISLAND PROVINCE (2008-2014)

**Fithri Diniati S\*, Isjoni\*\*, Kamaruddin\*\*\***  
zuffifithri@yahoo.com, Isjoni@yahoo.com, Kamaruddinoemar@yahoo.co.id  
Cp: 081372315777

**History Education Study Program**  
**Faculty Of Teacher Training and Education-University of Riau**

***Abstract:** Indonesian region is a dynamic region which has developed from time backwards, towards progress. Regional expansion is just one example is one example of the changes taking place in Indonesia. Expansion of a district is a reflection of regional autonomy, through the expansion process occurs because the powers of administrative autonomy in Indonesia. In this reform era, the development of the area will increase the overall national development. This is the concept of regional autonomy in Indonesia runs. As the main hope of autonomy territory is achieving the tasks of government well. Through regional expansion, the relationship between government officials and the public is getting closer, and the government apparatus it self increasingly have the ability to carry out the development of the nation and provide services to the community. This is because the relationship between government and society is getting shorter, as well as development planning is getting smaller. Along with the authority of local autonomy, Natuna then regional expansion districts, which by the end of 2008 to 19 districts with the addition, District Palmatak, Subi, Bunguran North Sea island, Pulau Tiga, Bunguran Northeast, Bunguran Central, Bunguran South, Serasan South, East Siantan, South Siantan, Jemaja East and Central Siantan. Along with the expansion of district that aims to shorten the control range, appears aspiration to make the Group of Anambas as its own autonomous region. Through a long struggle both at central and regional levels, Anambas Island finally formed through Law No. 33 Year 2008 dated June 24, 2008. Anambas Island consists of 7 District of the District Siantan, District East Siantan, District of South Siantan, District Central Siantan, District Palmatak. Jemaja sub-district and District East Jemaja.*

**Keywords:** History, Formation, Anambas Island

## SEJARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2008-2014)

**Fithri Diniati S\*, Isjoni\*\*, Kamaruddin\*\*\***  
zuffithri@yahoo.com, Isjoni@yahoo.com, Kamaruddinoemar@yahoo.co.id  
Cp: 081372315777

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Riau

**Abstrak:** Daerah Indonesia adalah daerah yang dinamis yaitu mengalami perkembangan dari masa kemasa, kearah kemajuan. Pemekaran daerah merupakan salah satu contoh merupakan salah satu contoh perubahan yang terjadi di Indonesia. Pemekaran suatu daerah kabupaten merupakan pencerminan dari otonomi daerah, sebab melalui pemekaran terjadi proses otonomisasi kekuasaan-kekuasaan administratif di Indonesia. Dalam era reformasi ini, perkembangan pada daerah akan meningkatkan perkembangan nasional secara keseluruhan. Inilah konsep dari otonomi daerah yang berjalan di Indonesia. Sebagai harapan utama dari otonomi daerah adalah terlaksananya tugas-tugas pemerintahan dengan baik. Melalui pemekaran daerah, maka hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat semakin dekat, dan aparatur pemerintah itu sendiri semakin mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembinaan bangsa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin pendek, serta perencanaan pembangunan semakin kecil. Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan, yang hingga akhir tahun 2008 menjadi 19 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan Selatan, Siantan Timur, Siantan Selatan, Jemaja Timur dan Siantan Tengah. Seiring dengan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom tersendiri. Melalui perjuangan yang cukup panjang baik di pusat maupun di daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Palmatak. Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur.

**Kata Kunci:** Sejarah, Pembentukan, Kabupaten Kepulauan Anambas

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia, Ibukotanya adalah Terempa Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Daerah Indonesia adalah daerah yang dinamis yaitu mengalami perkembangan dari masa kemasa, kearah kemajuan. Pemekaran daerah merupakan salah satu contoh merupakan salah satu contoh perubahan yang terjadi di Indonesia. Pemekaran suatu daerah kabupaten merupakan pencerminan dari otonomi daerah, sebab melalui pemekaran terjadi proses otonomisasi kekuasaan-kekuasaan administratif di Indonesia.

Dalam era reformasi ini, perkembangan pada daerah akan meningkatkan perkembangan nasional secara keseluruhan. Inilah konsep dari otonomi daerah yang berjalan di Indonesia.

Sebagai harapan utama dari otonomi daerah adalah terlaksananya tugas-tugas pemerintahan dengan baik. Melalui pemekaran daerah, maka hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat semakin dekat, dan aparatur pemerintah itu sendiri semakin mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembinaan bangsa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin pendek, serta perencanaan pembangunan semakin kecil.

Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan, yang hingga akhir tahun 2008 menjadi 19 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan Selatan, Siantan Timur, Siantan Selatan, Jemaja Timur dan Siantan Tengah.

Seiring dengan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom tersendiri. Melalui perjuangan yang cukup panjang baik di pusat maupun di daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan salah satu kerja untuk memahami suatu objek penelitian yang sistematis dan ilmiah intensif dari pelaksanaan penelitian guna memperoleh kebenaran yang optimal. Yang dimaksud dengan metode adalah patokan dalam meneliti dan menceritakan kisah sejarah yang akan memberikan batasan dan sasaran yang jelas dalam usaha yang melukiskan hari atau masa lampau.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode ilmu-ilmu sosial. Khususnya metode historis dan dokumenter. Yang dapat digunakan untuk mendekati permasalahan yang berhubungan dengan sejarah dibentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas.

Winarno Surachman (dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar) Metode Teknik menyatakan “ Sebuah metode dapat disebut historis atau dokumenter bila penyelidikan ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber dokumen. Pada umumnya metode historis berlangsung mengikuti pola sebagai berikut : pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data dan penyusunan data”.

Metode sejarah adalah sekumpulan prinsip / aturan yang memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan kata / bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dan hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini diperlukan proses mencari dan menemukan sumber, diuji dan dinilai secara kritik ekstern dan kritik intern, data dan fakta dirangkaikan dan kemudian diinterpretasikan dan dituangkan dalam penulisan sejarah. ( Nugroho Noto Susanto, 1984 : 11)

Dengan demikian kegunaan metode sejarah adalah untuk mengumpulkan bahan bercorak sejarah, kemudian dinilai secara kritis sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk tulisan yang ilmiah. Hal ini sejalan pula dengan tujuan metode sejarah yaitu untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, menilai dan mengevaluasi serta menjelaskan dan mensintesis bukti-bukti untuk menetapkan fakta dan mencari kesimpulan yang dapat dipertahankan.

Selain metode sejarah dan dokumenter penulis juga menggunakan metode deskriptif. Metode ini sebagai pelengkap dalam memperoleh data. Muhammad Nazir (dalam bukunya Metode Penelitian) Halaman 64 menyatakan “ Secara harfiah metode deskriptif adalah metodologi penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka “. Tetapi dalam pengertian metode penelitian yang lebih luas, diluar metode sejarah dan eksperimental serta lebih umum sering diberi nama metode survei.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik studi perpustakaan, dokumentasi dan wawancara. Untuk memperjelas tentang kegiatan yang dilakukan penulis dalam metodologi penelitian, maka penulis akan menetapkan antara lain: sasaran, tempat dan waktu penelitian yang akan diuraikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Timbulnya Keinginan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas Agar Menjadi Kabupaten**

Membentuk sebuah daerah otonomi bukanlah suatu hal yang mustahil dalam menjalankan pemerintahan karena merupakan salah satu implementasi dari sistem pemerintahan yang desentralisasi dimana diberikan kewenangan kepada daerah untuk menganut masyarakat setempat sesuai dengan aturan dan batasan-batasan sendiri, tetapi harus mengacu pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam pembentukan kabupaten yang perlu diperhatikan adalah syarat / kriteria pembentukan kabupaten agar nantinya tidak menjadi permasalahan baru dikemudian hari.

Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang cara penilaian pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Menjelaskan bahwa “Penilaian pembentukan kabupaten dengan menggunakan indikator-indikator yang tersedia”. Salah satu sistem penilaian adalah dengan

membandingkan rasio calon kabupaten dengan kabupaten induk, semakin dekat rasio maka semakin layak suatu daerah untuk dimekarkan.

Perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui proses yang lumayan panjang dan terkendala beberapa hal. Mulai dari penolakan Kabupaten induk, tertunda pembahasan pembentukan dikarenakan kelengkapan persyaratan administrasi, sampai pada sengketa penetapan letak ibukota. Dan akhirnya Daerah yang punya potensi ekonomi kandungan laut dan Migas ini ditetapkan sebagai sebuah Kabupaten.

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang sebelum mengalami perubahan status menjadi Kabupaten, merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja yang menjadi wilayah hukum Kabupaten Natuna. Saat ini Kepulauan Anambas merupakan Kabupaten termuda di Indonesia dan di Provinsi Kepulauan Riau, yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni Tahun 2008 melalui proses pemekaran Wilayah. Pembentukan Kabupaten baru tersebut disamping memberi harapan bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat juga memberikan gambaran mengenai dukungan dan keinginan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri secara mandiri sesuai dengan potensi serta kemampuan dan tidak terikat lagi dengan Kabupaten yang sebelumnya.

## **B. Keadaan Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Awal Mula Berdirinya**

### **1. Pendidikan**

Salah satu keberhasilan pembangunan disuatu Negara adalah apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui jalur pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Wajib belajar 6 tahun yang dilanjutkan dengan wajib belajar 9 tahun serta program pendidikan lainnya adalah bentuk upaya pemerintah dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang akhirnya akan tercipta sumber daya manusia yang tangguh yang siap bersaing pada era globalisasi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak bagi suatu daerah guna mencapai tujuan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia tidak hanya dapat digambarkan dari tingkat pendidikan masyarakatnya saja, tetapi juga terdapat hal yang berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat yang berakhir pada penilaian kualitas / harapan hidup. Atas dasar pertimbangan inilah, peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010-2015, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dengan perhatian utama pada pelayanan dasar pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dapat mendorong Link and Match antara dunia pendidikan dengan pasar kerja, dan mengembangkan masyarakat bisnis (enterpreneurship), disamping meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui perbaikan layanan, peningkatan penyediaan sarana / prasarana kesehatan.

## **2. Kesehatan**

Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator terhadap kemajuan suatu daerah. Pembangunan bidang kesehatan ini hendaknya harus memberikan pelayanan kesehatan secara merata dan murah bagi masyarakat. Sehingga dengan demikian akan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang baik menuju masyarakat sehat, produktif, sejahtera lahir dan bathin.

Secara umum, penduduk yang mengalami penyakit ringan dan sedang masih dapat diambil tindakan pengobatan sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas, namun untuk penyakit yang memerlukan rujukan ke spesialis atau yang memerlukan tindakan kuratif yang lebih intensif, mengingat Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah yang memenuhi standar dan belum didukung sarana yang memadai dan dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merupakan indikator lain untuk menentukan derajat kesehatan melalui ketersediaan sarana kesehatan dan kemudahan aksesnya, serta dukungan tenaga kesehatan yang berkualitas, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan kerja sama dengan beberapa rumah sakit dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan terhadap pasien rujukan dari Kabupaten Kepulauan Anambas.

## **3. Agama Penduduk**

Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mayoritas adalah beragama Islam, disamping itu juga penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Buddha. Untuk menunjang kegiatan keagamaan tiap-tiap agama membangun tempat ibadah masing-masing. Pembangunan tempat ibadah ini dibangun dari bantuan pemerintah daerah dan pihak swasta lainnya.

## **4. Kondisi Ekonomi**

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki nilai geostrategis yang sangat tinggi karena berada di Laut Cina Selatan yang saat ini merupakan jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia dan berada persis di tengah-tengah negara-negara Asean yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan beberapa tahun belakangan ini. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur yang ada, khususnya infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas, menjadikan wilayah ini seolah-olah terpinggirkan dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional maupun dunia

## **5. Kelautan dan Perikanan**

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki total luas wilayah 46.664,14 km<sup>2</sup> dan 98,65% merupakan lautan (46.029,77 km<sup>2</sup>), sedangkan daratannya

yang terdiri dari 255 pulau-pulau kecil seluas 634,37 km<sup>2</sup> hanya (1,35%) dari total luas wilayah. Kondisi geografis seperti ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas menyimpan sumber daya alam yang berlimpah. Lautannya yang luas menjadi potensi perikanan yang sangat besar, baik potensi perikanan tangkap (marine capture) maupun perikanan budi daya (marine culture).

## **6. Kehidupan Politik**

Pada tanggal 26 Mei 2010, untuk pertamakalinya Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pilkada yang telah dilaksanakan tersebut pasangan Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, SH meraih suara sah terbanyak dan terpilih sebagai pasangan calon kepala daerah. Pada tanggal 9 Agustus 2010 Gubernur Kepulauan Riau telah melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2011-2015.

## **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemekaran Kabupaten**

### **1. Faktor Pendukung**

#### **a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).**

Meningkatkan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang handal, terampil dan berakhlak mulia

#### **b. Mengatur Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara Optimal Terpadu dan Berkesinambungan.**

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam yang potensial maka perlu dilakukan pembagian zona pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek kelayakan dan kepatutan, membangun kawasan perkebunan dan pertanian, membangun kawasan budidaya laut, perencanaan yang matang dalam setiap pemberian izin, terutama perizinan tambang, membuka peluang pasar, mengelola potensi pariwisata dengan mengundang investor lokal dan luar negeri serta menyiapkan fasilitas sentra produksi sumber daya alam.

### **2. Faktor Penghambat**

#### **a. Masa Orde Lama**

Pada masa pemerintahan rezim Orde Lama berkuasa, kondisi Negara dalam pembenahan. Karena bangsa Indonesia pada waktu itu masih dalam rangka mencari sistem bagaimana yang baik untuk Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini disebabkan Negara masih baru merdeka sehingga banyak

aspirasi-aspirasi dari daerah yang belum dapat diperjuangkan, dan juga negara dihadapkan pada kesulitan ekonomi pada waktu itu.

b. Masa Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah menerapkan surat kebijaksanaan sentralisasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat. Sehingga aspirasi-aspirasi yang timbul dari masyarakat Kepulauan Riau (umumnya), Kabupaten Kepulauan Anambas (khususnya), tidak dapat tanggapan yang positif. Jadi, dengan demikian pernyataan otonomi daerah yang seluas-luasnya pada masa rezim Orde Baru hanya sebagai pemanis bibir dan lambang bagi negara.

Kabupaten Kepulauan Anambas resmi menjadi kabupaten pada bulan Juni tahun 2008. Dengan potensi-potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Kepulauan Anambas memang pantas untuk ditingkatkan statusnya menjadi sebuah kabupaten.

#### **D. Upaya yang Dilakukan dalam Memperjuangkan Pemekaran Kabupaten**

1. Musyawarah Besar Kepulauan Riau

Musyawarah Besar merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh dalam proses pembentukan kabupaten dalam rangka menyatukan persepsi yang berbeda dalam masyarakat dan membicarakan hal-hal teknis dalam pembentukan kabupaten.

Musyawarah Besar Masyarakat Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1999 di Tanjung Pinang yang menjadi wacana bagi tuntutan pemekaran wilayah di Kepulauan Riau, telah mengajukan eks Kewedanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu daerah pemekaran yang akan menjadi kabupaten/kota sendiri. Namun pada kenyataannya Eks Kewedanan Kabupaten Kepulauan Anambas telah terabaikan dan dianggap tidak cukup layak menjadi kabupaten/kota.

2. Pasca Mubes, Penetapan Nama Ibu Kota Kabupaten

Latar belakang berdirinya Kabupaten Kepulauan Anambas yang tentunya mempunyai sebab dan alasan tersendiri dari para pencetus dan tokoh-tokoh yang memperjuangkannya. Begitu pula masyarakatnya sebagai grass root pendukung dari terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebelum didengungkannya nama “Kabupaten Kepulauan Anambas” para petinggi-petinggi daerah dan masyarakat telah sepakat untuk membuat sebuah kabupaten.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau (2008-2014) dapat dilihat simpulannya sebagai berikut:

1. Sebelum Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi sebuah kabupaten sendiri, status Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebuah kecamatan dengan kabupaten induk di Natuna.
2. Keadaan Kabupaten Kepulauan Anambas pada awal mula berdirinya dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya:

- a. Pendidikan

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010-2015, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dengan perhatian utama pada pelayanan dasar pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dapat mendorong link and match antara dunia pendidikan dengan pasar kerja dan mengembangkan masyarakat bisnis (enterpreneurship).

- b. Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah rumah sakit lapangan, rumah sakit keliling darat, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, posyandu, poslansia dan puskesmas keliling laut.

- c. Agama Penduduk

Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mayoritas adalah beragama Islam, disamping itu juga penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Buddha. Untuk menunjang kegiatan keagamaan tiap-tiap agama membangun tempat ibadah masing-masing. Pembangunan tempat ibadah ini dibangun dari bantuan pemerintah daerah dan pihak swasta lainnya. Jumlah tempat ibadah Se-Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Masjid berjumlah 81, Mushalla berjumlah 47, Gereja berjumlah 6 dan Vihara berjumlah 2.

- d. Kondisi Ekonomi

Mayoritas penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas bekerja sebagai petani dan nelayan. Kondisi ini tentunya selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wilayah maritim. Secara garis besar terdapat beberapa potensi unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu minyak dan gas, pariwisata, kelautan dan perikanan.

- e. Kehidupan Politik

Pada tanggal 26 Mei 2010, untuk pertamanya Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang diikuti oleh 6 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Berdasarkan hasil pelaksanaan pilkada yang telah dilaksanakan tersebut pasangan Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, SH meraih suara sah terbanyak dan terpilih sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pada tanggal 9 Agustus

2010 Gubernur Kepulauan Riau telah melantik Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2010-2015.

3. Faktor pendukung pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:
  - a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
 

Meningkatkan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang handal, terampil dan berakhlak mulia. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, menumbuhkan kembangkan budaya lokal dan meningkatkan pembinaan dan toleransi umat beragama.
  - b. Mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
 

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam yang potensial maka perlu dilakukan pembagian zona pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek kelayakan dan kepatutan, membangun kawasan perkebunan dan pertanian, membangun kawasan budidaya laut, perencanaan matang dalam setiap pemberian izin, terutama perizinan tambang, membuka peluang pasar, mengelola potensi pariwisata.
4. Faktor penghambat pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:
  - a. Masa Orde Lama
 

Pada masa pemerintahan rezim orde lama berkuasa, kondisi Negara dalam pembenahan. Karena bangsa Indonesia pada waktu itu masih dalam rangka mencari sistem bagaimana yang baik untuk Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
  - b. Masa Orde Baru
 

Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah menerapkan surat kebijaksanaan sentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat. Sehingga aspirasi-aspirasi yang timbul dari masyarakat Kepulauan Riau (umumnya), Kabupaten Kepulauan Anambas (khususnya), tidak dapat tanggapan yang positif.
5. Upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:
  - a. Musyawah Besar Kepulauan Riau
  - b. Pasca Mubes
  - c. Proposal Pembentukan Kabupaten

## **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapai kemajuan daerah tersebut.
2. Untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyelenggaraan pembangunan kurang adanya keinginan masyarakat sendiri untuk ikut mengontrol, mengawasi pembangunan desa, sehingga masyarakat desa harus lebih aktif lagi dalam mengawasi pembangunan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hanifah (2005). **Rantau Berkabut**. Surabaya. Eureka
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2013
- Dihimpun Oleh Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan JUNLAK, Sinar Grafika. Jakarta 2000
- Dadang Juliantara (2000). **Arus Bawah Demokrasi**, Yogyakarta : Lingkungan Ampera Pustaka Utama
- Hadari Nawawi (1992). **Instrumen Penelitian Bidang Sosial**. Jogjakarta : Gajah Mada University Press
- Hugiono. (1992). **Pengantar Ilmu Sejarah**, Jakarta : PT. Bina Aksara
- Irwan Jamaluddin (2007). **Sya'ir Diut dan Polygelitik**. Jogjakarta : Basma
- Jujun S . Suria Sumantri (1969). **Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer**, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Kaho, Josef Riwu (2010). **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. Jakarta. Rajawali Pers
- Muhammad Nazir. (1982). **Metodologi Penelitian**, Jakarta : Ghali Indonesia
- Nugroho Noto Susanto. (1984). **Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer**, Jakarta : Inti Dayu Press
- Pengkajian Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas 2007
- Peraturan Pemerintah No.129 tahun 2000. Tentang Pemerintah Daerah
- Piter Abdullah (2002). **Daya Saing Daerah**, Jogjakarta : BPFE Jogjakarta
- Republik Indonesia. TT Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah

Rizal Alfian Malarangeng (2001). **Otonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Praktis**, Yogyakarta Bigraf Publishing

Sarundajang (2002). **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke daerah**, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Suharsini Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Sumadi Suryabrata (1982). **Metodologi Penelitian**, Jakarta : Rajawali

Suwardi MS. (1998). **Makalah Metode Penelitian Pendidikan Dalam Pendekatan Ilmu Sosial**, Pekanbaru

\_\_\_\_\_, (1983). **Metodologi Penelitian**, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.

Taufik Abdullah (1990). **Sejarah Lokal Di Indonesia**, Yogyakarta ; Gajah Mada University

Widjaja, H.A.W (2009). **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**. Jakarta. Rajawali Pers

Winarno Surachman (1982). **Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik**, Bandung : Tarsito

Zulkifli (1987). **Psikologi Perkembangan**, Bandung : Remadja Karya

## **SUMBER INTERNET**

<http://www.anambaskab.go.id/berita-179-anambas.html> (diakses pada tanggal 14 Maret 2015).

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/21/name/kepulauan-riau/detail/2105/kepulauan-anambas> (diakses pada tanggal 14 Maret 2015).

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29292/node/1011/uu-no-33-tahun-2008-pembentukan-kabupaten-kepulauan-anambas-di-provinsi-kepulauan-riau> (diakses pada tanggal 11 April 2015).